

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA UTANG LUAR NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 2014-2022

Asep Setiawan^{1,*}, Djoni Gunanto², Hamka³, Yusuf Saputra⁴

¹Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan 15419

^{2,3,4}Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan 15419

asepsetia@gmail.com

ABSTRAK

Utang luar negeri suatu negara mempengaruhi hubungan bilateral dan perilaku internasional. Indonesia telah mengakumulasi utang luar negeri mencapai Rp 7000 triliun dari berbagai pemerintah dan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingginya volume utang luar negeri terhadap politik luar negeri Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014-2022. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan akademisi dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan konsep utang luar negeri, politik luar negeri, dan saling ketergantungan yang kompleks. Hasilnya adalah bahwa ketika utang luar negeri meningkat, ketergantungan pada sumber keuangan luar negeri juga meningkat. Hubungan bilateral Indonesia di negara-negara pemberi utang juga di satu sisi semakin membaik. Namun demikian, pelaksanaan politik luar negeri dengan negara-negara ini tidak lagi kritis.

Kata kunci: utang, politik luar negeri, ekonomi, internasional, dependensi

ABSTRACT

The foreign debt of a country influences bilateral relations and international behavior. Indonesia has accumulated foreign debt to reach IDR 7000 trillion from various governments and institutions. The research aims to analyze the relationship between a high volume of foreign debt on Indonesia's foreign policy during Joko Widodo's administration from 2014-2022. It employed a qualitative approach, with data gathered through interviews with academics and document analysis. The study uses the concepts of foreign debt, foreign policy, and complex interdependence. It is revealed that as external sources increased, dependence on overseas financial sources also increased. Indonesia's bilateral relations in debt-giving countries are also on the one hand getting better. Nevertheless, the conduct of foreign policy with these countries is no longer critical.

Keywords: debt, foreign policy, economics, international, dependence

1. PENDAHULUAN

Pada 2022, utang Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun. Secara lebih rinci, utang Indonesia mencapai Rp 7.014,58 triliun pada 28 Februari 2022. Total utang tersebut sebesar Rp 6.919,15 triliun pada Januari 2022, meningkat sekitar Rp 95,43 triliun dalam periode satu bulan tersebut.

Sejak 2014, jumlah utang Indonesia meningkat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Utang Indonesia mencapai Rp 2.608,78 triliun pada 2014.

Utang di Indonesia mencapai Rp 4.779,28 miliar pada akhir masa pemerintahan pertama tahun 2019. Sedangkan utang Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun pada Februari 2022. Dari total utang yang mencapai Rp 7000 triliun, utang pemerintah Indonesia di luar negeri pada Maret mencapai sekitar Rp 2.921 triliun. Bank Sentral Indonesia mengumumkan bahwa ULN Indonesia sebesar USD 201,1 miliar setara dengan Rp 2.921 triliun. Sementara itu, ULN swasta mencapai

206,3 miliar dolar AS atau setara Rp 2,99 triliun.

Pemerintah menyatakan, Indonesia bisa membayar utang dalam dan luar negeri karena jumlahnya terkendali. Pernyataan tersebut disampaikan berkat rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB yang relatif stabil di kisaran 34,2 persen. Bangsa Indonesia mampu membayar utang ini dengan rasio tersebut karena selain penerimaan pajak dalam negeri, kinerja ekonomi Indonesia masih cukup tinggi.

Menurut pengalaman negara lain, ketergantungan suatu negara pada negara lain, termasuk utang dan bantuan luar negeri, membuatnya sulit untuk membangun negara. Demikian pula, beban utang yang tinggi dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara tertentu serta lembaga ekonomi dan perbankan.

Sri Lanka adalah salah satu contoh bagaimana utang luar negeri dapat menyebabkan kebangkrutan suatu negara sambil juga mengubah arah politik luar negeri negara itu. Beban utang negara yang berlebihan menyebabkan krisis ekonomi, mencegahnya melindungi kepentingan nasionalnya. Krisis ekonomi di negara ini memicu krisis politik. Contoh terbaru lainnya dari tingginya utang luar negeri yang menyebabkan krisis adalah Yunani pada tahun 2017.

Demikian pula, pemerintah Indonesia akan menanggung beban utang luar negeri ini, yang akan berdampak pada pelaksanaan politik luar negeri. Dampak ini dapat dirasakan karena, misalnya, implementasi politik luar negeri mengharuskan Indonesia merdeka dari sektor ekonomi, politik, dan militer negara lain. Sementara itu, Indonesia membutuhkan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri yang tidak terikat dengan kekuatan asing dapat memberikan bantuan kepada Indonesia tanpa bergantung pada banyak negara. Indonesia berutang kepada banyak negara, termasuk AS, China, Jepang, dan Singapura. Indonesia juga berhutang ke Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Dan di

dunia di mana Rusia terlibat dalam konflik di Ukraina, Cina dan AS terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan, dan AS, Rusia, dan Cina semuanya terlibat dalam konflik di Timur Tengah, Indonesia perlu memperhatikan bobot utang luar negerinya sebelum melaksanakan politik luar negeri.

Berbagai kajian mengenai dampak utang luar negeri menjadi perhatian sejumlah pakar. Suidarma dan Yasa (2021) menyatakan bahwa utang luar negeri berkontribusi terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang dan memiliki dampak yang signifikan. Temuan studi ini akan memberikan optimisme Indonesia dapat mengelola utang luar negeri sebagai sumber investasi domestik. Penelitian ini juga dapat mendorong Indonesia untuk mempertahankan potensi ekonominya di masa depan.

Cendekiawan seperti Junaedi, D., Norman, E., Salistia, F., Arsyad, M. R., & Paramansyah, A. (2022) fokus kepada dampak utang ke ekonomi Indonesia, Kusumasari, D. (2020) mengkaji utang luar negeri Indonesia dan dampaknya, Karimah (2020) menganalisa batas ambang rasio utang luar negeri Indonesia, Rangkyut and Hidayat (2021) membahas dampak utang luar negeri terhadap cadangan mata asing Azam dkk (2013) membahas peran utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu hubungan antara utang luar negeri dengan ketergantungan juga dibahas sejumlah pakar. Contohnya Geamănu, M., & Popescu, B.B. (2013) menganalisa utang luar negeri Rumania dan dampaknya terhadap politik luar negeri 2000-2013. Wader, S.G. (2015) membahas the Paradox Of Foreign Debt To Third World Nations In International Politics: A Rationale For Perpetual Dependency, Armstrong, A.G. (1981) mengkaji the Political Consequences of Economic Dependence.

Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana hubungan utang luar negeri Indonesia dengan hubungan luar negeri. Sejauh mana hal itu dapat mempengaruhi hubungan bilateral atau juga implementasi politik luar negeri yang aktif secara bebas.

THEORETICAL FRAMEWORK

Sebagian utang suatu negara berasal dari kreditur di negara lain. Kreditur asing ini dapat berupa pemerintah, lembaga keuangan internasional, atau lembaga bisnis swasta. Di sisi lain, pemerintah, perusahaan swasta, lembaga swasta, atau individu dapat menjadi orang yang melunasi utang luar negeri. Utang dapat datang dalam bentuk uang yang dipinjam dari pemerintah asing, bank swasta, atau lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.

Dari segi jenisnya, utang luar negeri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian.

- 1) Dana pembangunan resmi adalah pinjaman resmi lunak dengan kondisi yang biasanya diberikan kepada negara-negara berkembang melalui kerja sama bilateral atau dengan bantuan organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
- 2) Kredit Ekspor adalah pembiayaan melalui investasi dan modal yang disediakan dalam bentuk valuta asing atau rupiah. Bantuan kredit ini dikirim ke negara-negara bantuan dan eksportir. Biasanya, kredit ekspor bantuan luar negeri ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor negara atau perusahaan swasta.
- 3) Pinjaman Swasta adalah pinjaman atau pinjaman dari bank asing swasta yang bersifat komersial. Berbagai bentuk pinjaman swasta ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor tetapi juga dapat berupa obligasi atau surat berharga yang dibeli oleh orang asing.

Utang luar negeri ini dibayar kembali dengan cara yang sama seperti pinjaman yang diberikan. Jenis hibah pertama biasanya adalah pengembalian yang lambat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan jenis kedua adalah pinjaman luar negeri (pinjaman), syaratnya biasanya lebih ketat dan lebih berhubungan dengan bisnis.

Pertimbangan non-ekonomi seperti politik dan keamanan termasuk dalam kondisi untuk memberikan bantuan ekonomi dalam bentuk utang. Negara-negara kaya menggunakan instrumen bantuan asing ini termasuk utang untuk campur tangan di negara-negara lemah. Negara-negara maju juga memberikan bantuan dengan memiliki hubungan

diplomatik. Sedangkan negara-negara yang memiliki pandangan politik berbeda atau tidak memiliki hubungan diplomatik jarang bekerja sama di bidang pinjam meminjam dana. Ini karena bantuan keuangan dan lainnya seperti diplomasi, propaganda, dan aksi militer adalah bagian dari instrumen suatu negara untuk kepentingannya.

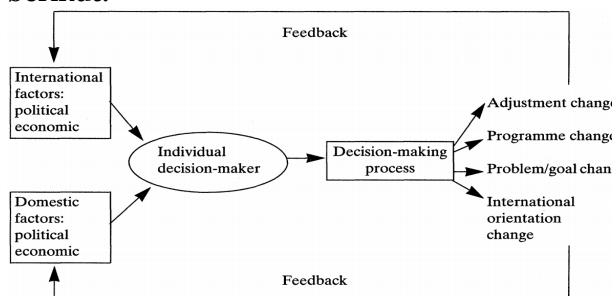
Politik Luar Negeri

Politik luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan peristiwa dan situasi di luar negaranya, yaitu:

- a) Politik luar negeri sebagai seperangkat orientasi (sebagai sekelompok orientasi). Politik luar negeri sebagai seperangkat orientasi adalah panduan bagi pengambil keputusan untuk menghadapi kondisi eksternal yang menuntut pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman historis, dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
- b. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak). Dalam hal ini, politik luar negeri berupa rencana dan komitmen konkret yang dikembangkan oleh pengambil keputusan untuk membina dan memelihara situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi politik luar negeri. Rencana aksi ini mencakup tujuan khusus serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup untuk mengatasi peluang atau tantangan dari luar negeri.
- c. Politik luar negeri sebagai bentuk perilaku atau tindakan (sebagai bentuk perilaku). Pada tingkat ini politik luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris, yaitu dalam bentuk langkah-langkah konkret yang diambil oleh pengambil keputusan terkait dengan peristiwa dan situasi di lingkungan eksternal.

Politik Luar Negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Gustavsson (1999) menggambarkan dampak

internasional dan domestik sebagai berikut:



Gambar 1. Model of Foreign Policy Dynamics

Source: Gustavsson (1999)

Di antara faktor-faktor internasional yang mempengaruhi politik dalam negeri adalah bidang ekonomi, termasuk pinjaman internasional. Faktor ekonomi ini dalam beberapa derajat menjadi dominan dalam perilaku suatu negara di dunia internasional. Hermann mengklasifikasikan empat tingkat perubahan politik luar negeri yang mencakup sejumlah indikator dalam yakni *Adjustment Changes*, *Program Changes*, *Problem/Goal* dan *International Orientation Changes*:

Berangkat dari model yang Gustavsson dan Hermann mengedepankan perilaku politik luar negeri dapat ditentukan faktor-faktor internasional yang sampai taraf tertentu lebih dominan daripada faktor domestik. Demikian juga, perilaku terhadap politik luar negeri bisa bertingkat mulai dari sekadar penyesuaian hingga perubahan orientasi politik luar negeri.

Studi akademis yang meneliti hubungan antara ketergantungan ekonomi dan politik luar negeri menunjukkan bahwa ada banyak perilaku politik luar negeri yang bergantung berbeda. Menurut tinjauan literatur, ada lima jenis politik luar negeri yang berbeda: kepatuhan, konsensus, kontra ketergantungan, kompensasi, dan independensi.

(a) Foreign policy alignment: compliance and consensus. Diperkirakan bahwa negara-negara Dunia Ketiga akan bersekutu dengan kekuatan kuat yang menjadi bawahan mereka karena kerentanan politik dan ekonomi mereka. Kepatuhan dan konsensus, dua gaya politik

luar negeri yang dibahas di sini, setuju bahwa keputusan politik luar negeri negara-negara yang bergantung akan selaras dengan keputusan intinya.

(b) Divergensi politik luar negeri: melawan ketergantungan dan kompensasi. Negara-negara yang bergantung secara ekonomi seringkali tidak hanya gagal mengikuti contoh inti tetapi juga secara aktif mengejar politik luar negeri yang secara langsung bertentangan dengan atau menentang tujuan hegemon. Menurut konsep kontra ketergantungan, politik luar negeri yang anti-inti digunakan oleh pembuat kebijakan di Dunia Ketiga yang tidak setuju dengan dampak yang merugikan secara politik dan ekonomi dari hubungan dependen. Sebaliknya, proses kompensasi dilakukan oleh pemerintah yang tidak dengan keras menolak hubungan ekonomi dengan inti tetapi dipaksa untuk mengatasi keraguan publik yang dihasilkan oleh hubungan semacam itu. Untuk meredakan konflik domestik yang datang dengan hubungan yang bergantung, politik luar negeri anti-inti digunakan.

(c) Foreign policy independence. Di sini, politik luar negeri yang merdeka adalah kebijakan yang berkembang dengan sendirinya sebagai akibat dari ketergantungan suatu negara pada yang lain. Perjanjian persahabatan atau kerja sama dengan negara-negara tetangga, kunjungan resmi antara para pemimpin yang bersahabat, dan undang-undang yang mendukung cita-cita internasional seperti hak asasi manusia atau perlindungan lingkungan global adalah beberapa contoh yang terlintas dalam pikiran. Baik politik luar negeri pro-inti atau anti-inti dapat diadopsi secara independen.

Interdependence

Penelitian ini juga terkait dengan teori Complex Interdependence. Karya Keohane dan Joseph Nye (1977) sangat terkait dengan teori Complex Interdependence. Koneksi antarnegara bagian, trans-pemerintah, dan transnasional adalah beberapa aspek dari Interdependensi Kompleks yang dijelaskan oleh Nye dan Keohane (1977).

Sementara realis dan neorealis mulai dengan asumsi bahwa saluran penghubung dalam politik dunia, menurut definisi, antar negara, penulis berpendapat bahwa agenda hubungan antarnegara bagian terdiri dari banyak tema yang tidak selalu hierarkis dengan jelas. Dengan demikian, "Masalah yang berbeda menghasilkan koalisi yang berbeda, baik dalam kerangka pemerintahan maupun transversal terhadap mereka dan melibatkan tingkat konflik yang berbeda." Demikian pula, diklaim dalam Complex Interdependence bahwa "negara-negara yang kurang rentan akan mencoba menggunakan saling ketergantungan asimetris dalam beberapa kelompok masalah tertentu sebagai sumber kekuatan".

Di luar perspektif realis, teori ini mencoba menghadirkan cara alternatif untuk menafsirkan perilaku negara dalam politik internasional. Namun, mereka tidak meninggalkan pendekatan realis sepenuhnya, sebaliknya dengan alasan bahwa saling ketergantungan yang lebih sering kompleks akan menghadirkan realitas yang lebih baik daripada perspektif realis.

Menurut Keohane dan Nye (1977), "ketergantungan" adalah keadaan ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh peristiwa atau kekuatan eksternal, sedangkan saling ketergantungan adalah keadaan saling ketergantungan. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa keterkaitan global didefinisikan oleh dampak timbal balik antara negara atau pemain di berbagai negara.

Tidak seperti realis, yang memandang negara sebagai satu-satunya aktor dalam politik internasional dan mengklaim bahwa kekuatan atau kekuatan adalah instrumen penting untuk kelangsungan hidup suatu negara, kaum realis memprioritaskan kekuatan militer di atas semua hal lainnya. Penekanannya, menurut para ahli teori Complex Interdependence, adalah pada berbagai cara di mana pemain transnasional menjadi saling bergantung, rentan, dan peka terhadap kebutuhan satu sama lain.

Sejak 1970-an, saling ketergantungan juga telah digunakan untuk menggambarkan dinamika yang bergeser

dalam hubungan negara. Peningkatan interaksi sosial, ekonomi, dan politik adalah salah satu elemen paling menonjol yang mempengaruhi penggunaan frasa ini. Berbeda dengan realisme, yang menekankan keamanan, saling ketergantungan kompleks liberal menekankan pentingnya relatif masalah ekonomi.

Akibatnya, telah disarankan bahwa kekuatan militer tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya penyebab hubungan negara. Di hadapan dinamika yang kompleks, negara berinteraksi satu sama lain. (Holsti, 1992). Namun, pendekatan ini mengabaikan interpretasi hierarkis. Ada lebih banyak masalah daripada itu. Otoritas negara, pedagang, investor, hubungan transnasional, kekuatan domestik, dan konsumen semuanya terlibat dalam hubungan yang rumit. Citra seperti ini menumbuhkan pemahaman timbal balik atau kooperatif. Peningkatan level perdagangan menghasilkan lebih banyak pertemuan dan, sebagai hasilnya, hasil yang lebih menguntungkan. Akibatnya, konsep realis tentang posisi negara kesatuan dan struktur dunia hierarkis tidak sesuai dengan kerangka kerja saat ini.

Namun, berkonsentrasi pada proses ekonomi tidak boleh dipahami sebagai mengabaikan pertimbangan politik Keohane dan Nye. Sebaliknya, dikatakan bahwa saling ketergantungan ekonomi yang lebih besar mengarah pada peningkatan saling ketergantungan politik karena ada hubungan struktural di antara mereka.

2. METODE PENELITIAN

Teknik kualitatif digunakan dalam studi tentang hubungan antara utang luar negeri Indonesia dan politik luar negeri. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode untuk menyelidiki dan memahami perilaku individu atau kelompok dalam kaitannya dengan masalah sosial dan manusia. (Creswell, 2014). Dalam teknik kualitatif ini, peneliti menafsirkan apa yang dilihat, didengar, dan dipahaminya. Lamont (2015) mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini berarti bahwa para peneliti mengumpulkan dan menganalisis

data yang bersifat *non-numerik* sekaligus lebih memahami lingkungan internasional di mana peristiwa tersebut terjadi.

Pemilihan metode ini dapat memberikan makna peristiwa yang menjadi objek penelitian (Boeije, 2010). Metode ini menyediakan data yang kaya dan deskriptif yang diperlukan untuk ditafsirkan melalui identifikasi dan pengkodean tema dan kategori yang ada yang mengarah pada temuan yang akan berkontribusi pada pengetahuan teoretis dan penggunaan praktis.

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini meliputi data primer berupa wawancara dengan akademisi dan peneliti. Sedangkan data sekunder berupa dokumen dan informasi akan dikumpulkan dari Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Data sekunder lainnya berasal dari lembaga penelitian, think-tank, situs media siber hasil survei, statistik, tabel, grafik, dan arsip lainnya.

3. HASIL DAN DISKUSI

Utang luar negeri Indonesia telah digunakan untuk membangun infrastruktur sejak Presiden Joko Widodo menjabat Presiden RI pada tahun 2014. Saat Jokowi mengambil alih kekuasaan pada 2014, ia mewarisi utang sebesar US\$122 miliar dari pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah empat tahun, utang tersebut meningkat 48 persen menjadi US\$181 miliar. Kenaikannya signifikan, mengingat utang naik 26 persen di bawah pemerintahan lima tahun SBY, dari 2009 hingga 2013. Sementara itu, rasio utang terhadap PDB negara itu tumbuh dari 24,7 persen menjadi 30 persen antara 2014 dan 2018. Namun, jumlah ini lebih rendah dari batas 60 persen ketentuan pengelolaan utang negara itu. Pemerintah telah menghabiskan sebagian besar anggaran diantaranya dari utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan tujuan utama pemerintahan Jokowi. Dana besar-besaran telah diarahkan untuk proyek-proyek skala besar seperti bandara, pelabuhan laut, sistem angkutan cepat massal, jalan tol, dan pembangkit listrik tenaga panas dan hidro.

Belanja infrastruktur terus meningkat sekitar US\$10 miliar per tahun di bawah rencana anggaran Jokowi, hampir empat kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Jokowi juga memprioritaskan belanja di dua sektor ekonomi penting lainnya: pendidikan dan kesehatan.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2022 mencatat bahwa posisi ULN Indonesia pada akhir Juli sebesar 400,4 miliar dolar AS. Jumlah ini turun dari bulan sebelumnya, yakni 403,6 miliar dolar AS. Tren penurunan tersebut terjadi dipengaruhi oleh penurunan utang luar negeri sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Juli 2022 tercatat menurun menjadi 185,6 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Juni 187,3 miliar dolar AS. Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta pada Juli 2022 tercatat sebesar 206,3 miliar dolar AS. Angka ini turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, sebesar 207,7 miliar dolar AS. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022, setidaknya ada 21 negara yang saat ini memberikan pinjaman untuk Indonesia.

Untuk memahami hubungan ULN dengan hubungan luar negeri Indonesia, data yang tersedia mengenai negara-negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia disajikan. Ada 8 negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia per Juli 2022.

1) Singapura USD 60.076 miliar 2) Amerika Serikat USD 33.527 miliar 3) Jepang USD 25.485 miliar 4) China USD 20.839 miliar 5) Hong Kong USD 17.634 miliar 6) Korea Selatan USD 6.408 miliar 7) Jerman USD 5.476 miliar, 8) Belanda USD 5.210 miliar.

Secara umum, hubungan Indonesia dengan negara-negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia dalam hubungan politik dengan negara-negara tersebut dalam kondisi normal dan baik. Artinya, baik Indonesia maupun negara mitra memiliki hubungan politik yang stabil, dapat dikatakan tidak ada

pertikaian politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya hubungan politik seperti itu, beban utang Indonesia yang besar berada dalam kondisi yang dapat dibayar secara bertahap tanpa harus mengganggu hubungan diplomatik. Artinya, setidaknya delapan negara yang meminjamkan uangnya tidak terganggu dengan kinerja ekonomi dan politik Indonesia. Dengan pemerintahan yang stabil dari tahun 2014 hingga 2022, jumlah utang dapat dipahami oleh negara-negara mitra sebagai upaya untuk membangun ekonomi. Indonesia juga dinilai mampu mengembalikan utangnya sesuai jadwal.

Hubungan Indonesia antara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Jokowi ditandai dengan beberapa kerja sama di bidang ekonomi bahkan pendidikan. Meski Indonesia terdampak Perang Dagang antara China dan Amerika Serikat, karena ada lobi dari Jakarta, dampaknya terukur. Pergantian pemerintahan dari Barack Obama, Donald Trump kemudian Joe Biden, hubungan bilateral kedua negara bisa dikatakan tidak banyak gangguan. Ini sebagian karena Washington masih menempatkan Indonesia pada posisi strategis di Asia.

Demikian juga hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura berada dalam posisi yang stabil dan berkembang. Indonesia dan Singapura baru-baru ini menandatangani perjanjian pengelolaan wilayah udara. Demikian juga, Singapura menerima perjanjian ekstradisi bagi pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke negara itu. Hubungan Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan juga tumbuh karena tingginya hubungan perdagangan. Indonesia membuka pasar untuk produk Jepang dan Korea Selatan dari produk elektronik hingga otomotif. Indonesia dan Korea Selatan melanjutkan kerja sama di bidang pertahanan. Secara kuantitatif, volume perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan dan Jepang masih tinggi. Utang Indonesia yang besar kepada kedua negara dapat dikatakan tidak mengganggu hubungan ekonomi dan politik kedua belah pihak.

Namun demikian, dampak utang luar negeri terhadap politik luar negeri

Indonesia dapat ditemukan terhadap meningkatnya utang luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok. Terlepas dari implikasi ekonomi, ketergantungan Indonesia yang semakin besar terhadap Tiongkok memiliki dampak politik yang mendalam. Ketika Indonesia menjadi lebih bergantung pada Tiongkok, lebih sulit untuk melawan agresivitas Tiongkok yang semakin meningkat di Laut Cina Selatan. Dilaporkan kapal penangkap ikan China sering masuk tanpa izin di wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Namun hubungan Indonesia dengan China telah mencegah Jakarta bertindak agresif di Laut Cina Selatan kecuali jika siap kehilangan mitra dagang terbesarnya dan salah satu investor terbesarnya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara kredit relatif stabil. Hampir dapat dikatakan bahwa pada periode 2014 hingga 2022 tidak ada konflik yang mengharuskan Indonesia untuk berhadapan secara frontal dengan negara-negara tersebut. Hubungan diplomatik yang stabil ini telah memberikan banyak kesempatan bagi Indonesia untuk fokus membangun negaranya sehingga mampu membayar utang dari hasil produktivitas, antara lain karena pembangunan infrastruktur.

Namun, dapat dicatat di sini bahwa dengan beban utang yang tinggi meskipun diklaim oleh pemerintah sebagai sesuatu yang berada dalam batas-batas kewajaran, hal itu menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia semakin besar terhadap negara-negara yang memberikan bantuan. Akibatnya, hubungan luar negeri Indonesia tidak lagi kritis dalam hal-hal yang membutuhkan independen, bebas dan juga aktif dalam menciptakan perdamaian. Dalam kasus serangan Rusia terhadap Ukraina yang dibalas dengan bantuan militer Barat ke Ukraina di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, Indonesia tidak dengan tegas menyatakan sikapnya yang mengkritik langkah Barat untuk mempersenjatai Ukraina.

Selain dari pihak Indonesia, ada tantangan dalam implementasi politik luar negeri, dari sisi pemberi pinjaman, beberapa tuntutan mungkin muncul.

Dengan Amerika Serikat mempertimbangkan bahwa utang mencapai USD 33 miliar, adalah mungkin bagi Washington untuk mendikte kerja sama, misalnya, dalam penyediaan vaksin COVID-19. Demikian juga, China bisa saja mendikte kerja sama dalam berbagai proyek infrastruktur seperti pada proyek kereta api lainnya. Sementara itu, dengan Singapura, Indonesia juga dapat condong ke Singapura dalam Kerjasama di bidang strategis Indonesia seperti Batam dan banyak kerja sama lainnya antara Indonesia dan negara-negara dan organisasi pemberi pinjaman luar negeri.

Namun, meski utang Indonesia sudah Rp 7000 triliun dan dibayarkan melalui cicilan dan alokasi APBN yang ada, hingga saat ini mungkin belum ada tekanan yang signifikan dari pihak luar. Artinya, Indonesia masih bisa bernegosiasi untuk mengalihkan sumber pendanaan lain jika dianggap sebagai sumber pendanaan saat ini dianggap ikut campur dalam urusan dalam negeri. Sejauh ini Indonesia belum pernah mendengar besarnya tekanan dari IMF karena kita bisa saja pindah ke sumber lain.

Karakteristik politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dengan sikap tegas di dunia internasional sedikit direduksi untuk tidak dikategorikan memudar. Hal ini juga secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan fokus pembangunan Indonesia di negara tersebut dengan beban utang yang besar kepada negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman. Dalam beberapa penelitian, ketergantungan pada orang asing dapat menyebabkan tidak lagi bebas menjalankan politik luar negeri mereka. Meskipun tidak ada batasan tertulis tetapi bagaimanapun sebagai negara dengan hutang besar itu tidak bisa lagi bebas semata-mata dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan tegas.

4. KESIMPULAN

Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri akan berdampak pada perilaku Indonesia dalam hubungan bilateral dan perilaku di dunia internasional. Berkaca pada pengalaman

Sri Lanka dan Yunani, misalnya, jumlah utang membawa risiko besar bagi hubungan luar negeri. Utang yang besar baik dari pemerintah maupun dari swasta membuat Indonesia bergantung pada luar negeri karena harus membayar utangnya secara layak. Hutang besar ini menyedot anggaran setiap tahun.

Dampaknya terhadap Indonesia jelas bahwa besarnya utang tersebut akan berdampak pada implementasi politik luar negeri Indonesia. Salah satu contoh bagaimana peningkatan utang luar negeri terkait dengan China. Indonesia yang memiliki masalah perbatasan di Laut Natuna Utara tidak bisa lagi bebas mempertahankan kepentingan nasionalnya karena China telah memberikan utang kepada Indonesia meskipun jumlahnya tidak besar dibandingkan dengan keseluruhan utang sebesar Rp 7000 triliun.

Namun, dengan beban utang dan juga beban pembayaran setiap tahunnya, Indonesia harus memiliki hubungan yang baik dengan penyedia bantuan utang baik dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta. Dengan perilaku seperti itu tidak mudah untuk melakukan politik luar negeri yang independen karena akan ada konsekuensi dari pemberi pinjaman atau dari sekutu atau pendukung pemberi pinjaman. Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji kembali seberapa besar utang Indonesia dengan kepentingan Indonesia di dunia internasional. Selain risiko pengelolaan utang yang tinggi, kepentingan nasional Indonesia di luar negeri harus diperjuangkan tanpa harus memiliki beban utang luar negeri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan bantuan untuk penelitian ini dengan nomor kontrak 324/R-UMJ/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Azam, M., Emirullah, C., Prabhakar, A. C., & Khan, A. Q. (2013). The role of

- externadebt in economic growth of Indonesia-A blessing or burden? *Middle-East Journal of Scientific Research*, 18(8), 1111-1118.
- Armstrong, A.G. (1981). The Political Consequences of Economic Dependence. *Journal of Conflict Resolution*, 25, 401 - 428.
- Bacescu-Carbutaru, A., & Condruz-Bacescu, M. (2012). Dependence Of Country Risk Compared to The Foreign Debt Level. *Romanian Statistical Review*, 60(10), 57-67.
- Boeije, Hennie. (2010). *Analysis in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage.
- Chess, Wibowo. (2012). *Analysis Factors Affecting The Government of Indonesia's External Debt 1990-2009*. Thesis. Faculty of Economics, Sebelas Maret University, Surakarta.
- Colombo, E., & Longoni, E. (2009). The politics of external debt in developing countries. *University of Milan Department of Economics Working Paper Series*, 176, 1-22.
- Creswell, John. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Desker, B. (2022). Singapore-Indonesia Ties: Renewed Deal for A New Age.
- Geamănu, M., & Popescu, B.B. (2013). Analysis of Romania's external debt and the implications for foreign relations during 2000-2013. *Annals of Spiru Haret University Economic Series*, 4, 61-67.
- Gustavsson, J. (1998). The politics of foreign policy change. *Explaining the Swedish Reorientation on EC Membership*.
- Hey, J.A. (1993). Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador. *Journal of Latin American Studies*, 25, 543 - 574.
- Holsti, K.J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Inkiriwang, F. W. (2020). The dynamic of the US-Indonesia defence relations: the 'IMET ban' period. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 377-393.
- Jeanne A.K. Hey (1993). Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador. *Journal of Latin American Studies*. 25, pp 543-574 doi:10.1017/S0022216X00006660.
- Junaedi, D., Norman, E., Salistia, F., Arsyad, M. R., & Paramansyah, A. (2022). The Analysis of the Impact of Debt on the Indonesian Economy for the Period 1976-2021. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 1(1), 1-18.
- Karimah, S. (2020). The Threshold of External Debt Ratio in Indonesia. *Journal of Business and Political Economy: Biannual Review of The Indonesian Economy*, 2(1), 99-111.
- Keohane and Joseph Nye. (1977). *Power and Interdependence: World Politics*. Boston: Little, Brown and Company.
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Adhayanto, O. (2022). Travel Corridor Arrangement Application Process by Governments of Indonesia and Singapore. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(2), 263-274.
- Kusumasari, D. (2020). External debt of Indonesia : From debt-led growth to growth-led debt? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18 (June), 21-30.

- Lamont, Christopher.(2014). *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Laksmana, E. (2018, October). Are military assistance programs important for US–Indonesia ties. In *East Asia Forum*. Accessed on (Vol. 2).
- Navalino, R. D. A. (2022). Military-Industrial Complex on Indonesian Defense Industry Cooperation–South Korea to Support The Defense Economy. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(3), 20905-20911.
- Nazamuddin, B. S., Wahyuni, S. S., Fakhruddin, F., & Fitriyani, F. (2022). The nexus between foreign exchange and external debt in Indonesia: evidence from linear and nonlinear ARDL approaches. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 1-27.
- Picard, Louis A and Robert Groelsema. (2015). US Foreign Aid Priorities: Goals for the Twenty-First Century. In *Foreign Aid and Foreign Policy Lessons for the Next Half-Century*. Edited by Louis A. Picard Robert Groelsem and Terry F. Buss. London: Routledge.
- Sitepu, V. M. (2021). The Effect of Foreign Direct Investment and External Debt on Economic Growth in Indonesia. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(2), 78-82.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulibrrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Richardson, N. R. (1978). *Foreign policy and economic dependence*. University of Texas Press.
- Rifki, M. (2021). *Implementation Indonesia-Japan bilateral Relations After The Agreement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Setiawan, Asep and Endang Sulastri. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ Press.
- Sari, M. I. (2021). Encouraging the Renegotiation Process between Indonesia and South Korea for the Continuation of the KFX/IFX Jet Fighter Cooperation Project.
- Simone Dietrich. (2021). *States, Markets, and Foreign Aid*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suidarma, I., & Yasa, I. (2021). The Contribution of External Debt to Economic Growth: An Empirical Investigation in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(10), 11-17.
- Verico, K., & Riefky, T. (2022). Bilateral Trade and Investment Relations Analysis:Indonesia and South Korea. *International Journal of Business and Society*, 23(2), 714-750.
- Wader, S.G. (2015). The Paradox Of Foreign Debt To Third World Nations In International Politics: A Rationale For Perpetual Dependency. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 2.
- Gangte, Lammuaniam. (2020). The debt-trap diplomacy revisited: A case study on sri Lanka's hambantota port. *Artha Journal of Social Sciences*, 19(2), 53-66. doi:<https://doi.org/10.12724/ajss.53>
- Growing dependence on China is dangerous for Indonesia – what can be done?. (November 27, 2020).

theconversation.com.
<https://theconversation.com/growing-dependence-on-china-is-dangerous-for-indonesia-what-can-be-done-150372>.

[?accountid=25704](#). Accessed
September 2, 2022.

Interviews

Dean of Faculty of Economic and Business,
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Dr. Luqman Hakim

Lecturer International Relations
Department University of Pertamina
Dr. Ian Montratama.

Hardiantoro, Alinda. (2022). Reaching IDR 7,000 Trillion, Why Does Indonesia's Debt Continue to Rise? This is the Ministry of Finance's Explanation. (April 16, 2022). Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/16/160400465/tembus-rp-7.000-triliun-mengapa-utang-indonesia-terus-naik-ini-penjelasan?page=all>. Accessed September 1, 2022.

Indonesia's External Debt in February 2022 Remains Under Control. (April 14, 2022). bi.go.id. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2410322.aspx. Accessed September 1, 2022.

List of the 5 Largest Debtor Countries to Indonesia, The People Should Know. (January 18, 2022). economy.okezone.com. <https://economy.okezone.com/read/2022/01/18/320/2533868/daftar-5-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia-rakyat-harus-tahu>.

Putri, Diva Lufiana. (2022). Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia. kompas.com 21 September 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/21/120000965/daftar-10-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia?page=all>. Accessed September 22, 2022.

Sri lanka: Sri lanka's foreign debt default: Why the island nation went under. (2022, Apr 15). Asia News Monitor Retrieved from <https://www.proquest.com/newspapers/sri-lanka-lankas-foreign-debt-default-why-island/docview/2650035516/se->